

**PERAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI DEMOKRASI
SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII DI SMPN 8
KOTA CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.I)
Pada Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon



Oleh :

MUSLIKIN
NIM: 14111420094

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2015 M / 1436 H**

**PERAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI DEMOKRASI
SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII DI SMPN 8
KOTA CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.I)
Pada Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Oleh :

MUSLIKIN
NIM: 14111420094

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2015 M / 1436 H**

ABSTRAK

MUSLIKIN: “Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Demokrasi Siswa Pada Pembelajaran IPS Kelas VIII Di SMPN 8 Kota Cirebon”.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di SMPN 8 Kota Cirebon, ditemukan bahwa guru memiliki peranan yang penting dan strategis terutama guru Mata Pelajaran IPS dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Namun dalam kenyataannya guru IPS masih menggunakan metode konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut membuat penulis terdorong untuk meneliti tentang profesionalisme guru mata pelajaran IPS dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Karena profesionalisme yang dimiliki guru mata pelajaran IPS memiliki pengaruh besar dalam kesuksesan belajar siswa. Profesionalisme yang dimiliki guru mata pelajaran IPS muncul benar-benar berasal dari ketulusan hati dan wujud tanggung jawab sebagai tenaga pendidik di Negeri Indonesia ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui data mengenai peranan dan langkah-langkah guru mata pelajaran IPS dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi terhadap siswa kemudian mendeskripsikanya, serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui implikasi mata pelajaran IPS terhadap kebutuhan dan minat siswa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research (penelitian/studi pustaka) dan field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta menggunakan teknis analisis isi (content analysis) berupa empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan conclusy data atau pengambilan kesimpulan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data teoritik dan data empirik. Sumber data teoritik diambil dari referensi buku-buku dan referensi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian. Data empirik diambil dari hasil kegiatan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa responden. Objek penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS.

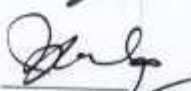
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan pendidikan berbasis demokrasi melalui mata pelajaran IPS dilakukan dengan berbagai strategi, metode, model dan pendekatan yang dilakukan secara terpadu. Penanaman nilai-nilai demokrasi juga dilakukan secara intensif baik dalam KBM maupun luar KBM seperti kegiatan pemberian keteladanan dan kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram. 2) terdapat sikap demokrasi pada siswa dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi pada mata pelajaran IPS melalui pembiasaan diantaranya kegiatan pemilihan ketua kelas, pembelajaran IPS dengan metode diskusi dan kesadaran diri peserta didik akan kebersamaan pada saat belajar. 3) adanya fakta-fakta penanaman nilai demokrasi, misalnya pada saat pembelajaran adanya sikap menghargai pendapat orang lain, toleransi dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: Guru, IPS dan Nilai Demokrasi.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Demokrasi Siswa Pada Pembelajaran IPS Kelas VIII di SMPN 8 Kota Cirebon**, oleh Muslikin, NIM 14111420094 telah dimunaqasahkan pada Rabu, 27 Mei 2015 dihadapan Dewan Penguji dan dinyatakan **Lulus**.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd NIP. 19721215 200501 2 004	<u>09-06-2015</u>	
Sekretaris Jurusan Euis Puspitasari, S.E M.Pd NIP.19810313 201101 2 008	<u>09-06-2015</u>	
Penguji I Dra. Hj. Isnin Agustin Amalia, MA NIP.19630805 198803 2 001	<u>09-06-2015</u>	
Penguji II Dr. Yayat Suryatna, M.Pd NIP.19611010 198703 1 004	<u>03-06-2015</u>	
Pembimbing I Dr. H. Bambang Yuniarto, M.Si NIP.19630618 199603 1 001	<u>09-06-2015</u>	
Pembimbing II Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd NIP. 19721215 200501 2 004	<u>09-06-2015</u>	

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan


Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag
NIP. 19721220 199803 1 004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO HIDUP	vii
BIODATA PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	11
D. Pertanyaan Penelitian	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II PROSES, NILAI DAN SIKAP DEMOKRATIS DALAM	
PEMBELAJARAN IPS	13
A. Kajian Teori	13
1. Tinjauan Tentang Peran	13
2. Tinjauan Tentang Peran Guru Dalam pembelajaran IPS ...	15
3. Tinjauan Tentang Pembelajaran IPS	20
4. Tinjauan Tentang Sekolah Demokrasi	23
5. Tinjauan Tentang Nilai-nilai Demokrasi	27
6. Tinjauan Tentang Sikap Demokrasi	34
B. Bukti Penelitian Yang Relevan	34

	C. Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	41
	A. Jenis Penelitian.....	41
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	42
	C. Profil Sekolah.....	43
	D. Subjek dan Objek Penelitian	47
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
	1. Instrumen Pengumpulan Data	47
	2. Teknik Pengumpulan Data.....	49
	F. Keabsahan Datata.....	53
	G. Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	61
	A. Upaya Guru Dalam Menanamkan Nilai Demokrasi Pada Siswa Kelas VIII.....	61
	1. Pembelajaran Dalam Kelas	61
	2. Nilai Keteladanan	70
	3. Kegiatan Ekstrakurikuler.....	73
	B. Sikap Demokrasi Siswa Pada Pembelajaran IPS Kelas VIII	78
	1. Pemilihan Ketua Kelas	78
	2. Pembelajaran Diskusi	80
	C. Peran Fakta-fakta Yang Menjadi Upaya Penanaman Nilai Demokrasi Pada Siswa Kelas VIII.....	88
	1. Menghargai Pendapat Orang Lain.....	88
	2. Toleransi	96
	3. Kebebasan Yang Bertanggung Jawab	97
BAB V	PENUTUP	102
	A. Kesimpulan	102
	B. Saran-Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi sekarang ini jalan untuk mengeyam pendidikan yang layak harus dicapai oleh rakyat Indonesia masih terasa susah, seharusnya setiap warga negara itu berhak untuk mendapat pendidikan dengan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Meskipun pemerintah dalam pembiayaan pendidikan sudah menganggarkan sebesar 20% seperti yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “ Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”, akan tetapi dalam kenyataannya sekarang ini pemerintah belum mampu untuk mewujudkan hal itu di lapangan.

Salah satu faktor yang mendasar dan menjadi bumerang akan hal *transparansi* pengalokasian anggaran pembiayaan pendidikan sekarang ini masih banyaknya praktek korupsi oleh para birokrat kita yang lebih mementingkan ego untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan menutup mata dan telingahnya tanpa memikirkan nasib anak- anak bangsa jika tidak berpendidikan, sungguh sangat miris sekali. Hal ini berdampak sangat besar untuk menghambat proses pembelajaran karena *supplay* dana yang tidak sesuai dengan apa yang telah dianggarkan oleh pemerintah banyak sarana dan prasarana pendidikan tidak layak digunakan lagi dan banyak anak-anak yang putus sekolah akibat tidak mampu untuk membayar uang sekolah karena masih adanya komersialisasi pendidikan di sekolah-sekolah, seharusnya anak- anak tersebut mendapat kedudukan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, jangan direpotkan dalam mendapatkan pendidikan di negara ini.

Indonesia berada diurutan ke 59 di bawah Malaysia yang berada diurutan 54 dalam *Education devolopment index*, ini mencerminkan alangkah rendahnya

mutu pendidikan kita dan masih bersifat parsial untuk *input*, *proses*, serta *output*.

Di samping dari segi repotnya mendapatkan pendidikan di negara Indonesia masalah yang muncul sekarang ini adalah banyak sekali terjadinya kekeliruan-kekeliruan dalam dunia pendidikan saat ini tidak sesuai lagi dengan tujuan pendidikan yang semestinya. Hal ini disebabkan penyelenggaraan pendidikan tidak efektif dan efisien bahkan lebih banyak menonjolkan penyimpangan.

Perubahan pandangan tentang peran manusia, dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan menjadi manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu memebentuk manusia berkarakteristik personal yang paham dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya bukan sekedar siap pakai. Pendidik di Indonesia lebih nyaman dalam kemapanan dan bersikap antiperubahan artinya lebih banyak guru pekerja dari pada guru pengajar, karena guru yang hebat adalah guru yang bisa mendemonstrasikan pelajaran dan guru yang baik adalah guru yang dapat menginspirasi siswanya.

Banyak sekali ungkapan dari menteri pendidikan dan kebudayaan serta pejabat pendidikan yang bertentangan dengan prinsip perubahan. Misalnya, istilah pengajaran, dalam arti belajar dan mengajar masih tidak berubah menjadi pembelajaran. Prinsip-prinsip perubahan tidak dijiwai oleh para pejabat pendidikan sehingga menimbulkan kesan seolah-olah pendidikan nasional tidak memiliki arah. Padahal bukan sistem pendidikan yang tidak mempunyai arah, melainkan pelaksana-pelaksana kebijakan pendidikan nasional yang salah arah.

Untuk itu sepatutnya tujuan pendidikan nasional harus terlaksana dan dapat diimplementasikan, karena tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang dan tujuan yang ideal bangsa Indonesia. Seperti yang termaktub dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 1989 Bab II pasal 4 berbunyi” Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmanai dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dalam undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003 Bab II pasal 3, juga mengatakan” pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Begitu pula tujuan yang lainnya harus dicapai seperti tujuan institusional yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap lembaga, tujuan kurikuler yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, dan tujuan instruksional seperti intruksional umum yaitu merupakan target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran dan instruksional khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai setelah terjadinya proses pembelajaran.

Kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak disegala bidang kehidupan termasuk juga bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan maju mundurnya sumber daya manusia. Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu berada. Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih ditekankan pada proses pembinaan kepribadian anak didik secara menyeluruh sehingga anak menjadi lebih dewasa.

Menghadapi berbagai masalah dan tantangan di atas, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara utuh dan menyeluruh terutama berakaitan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Dalam hal ini, perlu adanya perubahan sosial yang memberi arah bahwa pendidikan merupakan

pendekatan dasar dalam proses perubahan itu. Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill* atau *life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik. Pemecahan masalah secara reflektif sangat penting dalam pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama secara demokrasi. Dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan global dan persaingan pasar bebas, serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih, pemerataan pelayanan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokrasi (*democratic education*). Hal tersebut harus dikondisikan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini, sekolah sebagai sebuah masyarakat kecil (*mini society*) yang merupakan wahana pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang demokrasi (*democratic instruction*), agar terjadi proses belajar yang menyenangkan (*joyfull learning*). Dengan iklim pendidikan yang demikian diharapkan mampu melahirkan calon-calon penerus pembangunan masa depan yang sabar, kompeten, mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif dan siap menghadapi berbagai macam tantangan, dengan tetap bertawakal terhadap sang penciptanya. Bahwa apa yang dihadapi, apa yang terjadi, merupakan kehendak Ilahi yang harus dihadapi dan disyukuri (Mulyasa; 6: 2013).

Pembelajaran IPS di Sekolah Menengah Pertama yang bersifat terpadu (*Integrated*) bertujuan “agar mata pelajaran ini lebih bermakna bagi peserta didik sehingga mengorganisasi materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik”, (Sapriya; 2009: 48). Sehingga peserta didik dapat menguasai dimensi-dimensi pembelajaran IPS di sekolah, yaitu : “Menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan bertindak (*action*)”, (Sapriya; 2009: 49).

Oleh karena itu mata pelajaran IPS, merupakan “seleksi dan integrasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan disiplin ilmu-ilmu lain yang relevan, dikemas

secara psikologis, ilmiah, pedagogis, dan sosio-kultural untuk tujuan pendidikan. Untuk memahami masalah pendidikan IPS seseorang hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan pokok (*mode of inquiry*), metode yang digunakan dan konsep-konsep setiap disiplin ilmu, disamping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kependidikan dan psikologis serta permasalahan sosial”(Sapriya; 2009: 50)

Menyadari akan hal di atas, maka sesungguhnya pembelajaran IPS yang bersifat terpadu di sekolah-sekolah masih ditemukan ada masalah, terutama tingkat satuan pendidikan SMP. Misalnya di suatu sekolah hanya tersedia guru IPS dari spesialisasi keahlian pendidikan sejarah atau pendidikan geografi saja, sedangkan yang berasal dari spesialisasi keilmuan pendidikan ekonomi dan sosiologi tidak ada. Hal ini seyogyanya menjadi sebuah masalah apabila tenaga guru yang ada memiliki pemahaman yang kurang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial.

Guru IPS dituntut tidak saja perlu menguasai keterampilan atau kiat untuk mendidik dan mengajar, tetapi juga memiliki wawasan vertikal : wawasan yang mendalam dan reflektif tentang bidang studi yang diajarkannya, dan wawasan horizontal : wawasan yang melebar yakni ramah terhadap konsep-konsep, proposi-proposisi, dan teori-teori ilmu sosial ataupun ilmu-ilmu budaya, bahkan juga ekologi. Dengan kata lain, guru IPS harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran secara terpadu diorganisasikan dengan baik, dan secara terus menerus menyegarkan, memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Guna menuju ke arah itu, hendaknya guru IPS memahami, melaksanakan dan memegang teguh tentang landasan-landasan pendidikan IPS, yang terdiri dari : “landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, psikologis, dan landasan religius” (Supriya; 2009: 16). Oleh karena, setiap guru IPS dituntut untuk mampu menguasai dan melaksanakan pendekatan yang mampu mendorong dan mengantarkan peserta didik untuk

memperoleh integrasi dari nilai-nilai secara utuh dan bermakna, dari masa lampau sampai masa kini dalam pembelajaran IPS yang mereka terima.

Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen antara lain : pendidik (guru), peserta didik (siswa), materi, metoda, model-model pembelajaran, sumber belajar, alat evaluasi, media pembelajaran sebagai alat bantu.

Pembelajaran terpadu dan lain sebagainya yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tugas pendidik dalam hal proses belajar mengajar adalah mengupayakan agar terciptanya jalinan pengelolaan yang harmonis antara satu komponen dengan komponen lainnya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan manakala pembelajaran tersebut mampu mengubah diri peserta didik dalam arti dapat menumbuhkan kembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik sehingga peserta didik dapat memperoleh manfaat secara langsung dalam perkembangan pengetahuan dan kepribadiannya. Pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan potensi siswa merupakan kemampuan dan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru.

Hal ini didasari asumsi bahwa ketepatan guru dalam memilih model pembelajaran akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan hasil belajar siswa. Karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru berpengaruh terhadap kualitas proses belajar mengajar yang dilakukannya. Kondisi proses belajar mengajar di lingkungan sekolah dewasa ini masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan dan masih sedikit yang mengacu pada pelibatan siswa dalam proses belajar itu sendiri. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru belum mampu menumbuhkan budaya belajar siswa yang merasa nyaman, santai, termotivasi, dan tertantang guntuk belajar, belajar dan belajar. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap perolehan dan hasil belajar siswa.

Melihat permasalahan tersebut, maka isu yang sering diangkat oleh media masa cetak maupun elektronik tentang rendahnya mutu pendidikan kita dewasa ini secara kualitatif diduga disebabkan karena model pembelajaran yang dianut

oleh guru didasarkan atas asumsi bahwa IPS adalah suatu pengetahuan yang bisa dipindahkan secara utuh dari pikiran guru ke pikiran siswa. Dengan pembelajaran yang bermakna, peserta didik diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan keterampilan intelektual dan partisipatori yang menghasilkan pemahaman tentang arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di samping itu peserta didik akan memperoleh keuntungan dan kesempatan dari pembelajaran yang bermakna untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (*politics*) dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) pada tingkat kelas dan sekolah mereka sendiri, berpartisipasi dalam simulasi kegiatan ke parlemen.

Dengan demikian maka proses belajar dan pembelajaran perlu mengintegrasikan aktivitas moral, sosial, dan spiritual sehingga akumulasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan tidaklah bebas nilai (*valuefree*), melainkan selalu memiliki interrelasi dengan nilai-nilainya secara kontekstual dalam kepentingan kehidupan masyarakat yang makin pluralistik, termasuk yang menghargai hakikat kesatuan manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan religius. Untuk meningkatkan prestasi belajar IPS selain mempertimbangkan faktor teknik pembelajaran yang diterapkan guru, guru juga perlu mempertimbangkan faktor internal siswa yang salah satunya adalah sikap demokrasi.

Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media masa, institusi atau lembaga pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dan diri individu. Berbagai faktor tersebut saling berinteraksi dalam pikiran seseorang yang menghasilkan sikap.

Menjelaskan bentuk masyarakat demokrasi akan tumbuh kokoh jika dikalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di masyarakat adalah toleransi, bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dalam komunikasi, menjunjung

nilai dan martabat kemanusiaan, tidak menggantungkan diri pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan dan keseimbangan. Menjelaskan nilai-nilai demokratis itu adalah mengakui persamaan derajat, menghargai pihak lain, mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menerima dan menghargai perbedaan kultur dalam masyarakat, peka terhadap kesulitan orang lain, berlaku adil, memiliki kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Nilai-nilai demokrasi tersebut hendaknya dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap demokrasi merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif dan evaluatif, yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek yaitu tentang demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, sikap demokratis siswa perlu diperhatikan dalam pembelajaran IPS mengingat pembelajaran IPS banyak melibatkan predisposisi untuk merespon obyek sosial dalam interaksi dengan situasi dan aturan lain yang memimpin dan mengarahkan tingkah laku seseorang secara nyata.

Semakin tinggi sikap demokrasi siswa, memungkinkan siswa berkembang dan berprestasi dibidang IPS dalam kegiatan pembelajaran dan siswa yang tidak memiliki sikap demokrasi tinggi akan pesimis terhadap kemampuannya dalam memecahkan masalah dalam merespon objek sosial dan berinteraksi dengan situasi dan materi pembelajarannya.

Pembelajaran IPS yang diberikan di lingkungan sekolah kepada para siswa adalah tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas melalui intelegensi (kecerdasan otak) tetapi juga menyangkut internalisasi pendidikan demokrasi di manapun berada.

Pengaruh pendidikan di sekolah pada kalangan siswa baru dapat terwujud apabila guru bersangkutan benar-benar memiliki personalisasi yang bulat yaitu : berwibawa, terampil dalam menerapkan metode yang sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan remaja atau siswa, di samping lingkungan motivasional yang ada harus benar-benar dukungan positif kepada penghayatan, perkembangannya terhadap penanaman nilai demokrasi pada siswa.

Demokrasi berasal dari kata Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, *kratos* berarti pemerintah. Jadi *demokrasi*, artinya pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, Usis (1996 : 6) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11 (sebelas) pilar atau soko guru, yakni “kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang dipilih, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, serta kerja sama dan mufakat.”

Dalam dunia pendidikan diperlukan juga pendidikan demokrasi sebagai bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi pada peserta didik tentang bagaimana kewajiban dan hak serta kebebasan berpendapat dengan saling menghargai satu sama lainnya. Pendidikan demokrasi terbagi menjadi tiga :

1. Pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa bagaimana agar mencintai negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan tinggi.
2. Pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai berdemokrasi. Selain itu, sebagian hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya yang langsung dirasakan hasilnya.
3. Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang melewati tahap diluar lingkungan masyarakat. Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab pendidikan diluar sekolah mempunyai variable ataupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang.

Berdasarkan penelitian awal di SMPN 8 Kota Cirebon ditemukan bahwa, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar guru selalu menggunakan metode *konvensional* seperti ceramah dan tanya jawab. Di sini guru lebih aktif dalam pembelajaran dan dianggap salah satu sumber bagi siswa, akibatnya bisa menghasilkan siswa yang pasif, bosan dan monoton sehingga kurangnya kreatifitas siswa dalam belajar mata pelajaran IPS ini.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis berusaha menawarkan sebuah solusi dalam rangka memperbaiki dan mempertahankan bangsa ini yaitu setiap pembelajaran mata pelajaran IPS seorang guru hendaknya melakukan pendekatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Baik itu nilai demokrasi yang berbau lokal maupun nasional untuk meningkatkan sikap demokratis mereka.

Kebudayaan Indonesia yang plural, cara hidup yang beragam, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan indikator bahwa negeri ini sangat kaya akan nilai budayanya. Faktor ini telah menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai sikap yang berdemokrasi.

Atas dasar inilah penulis mencoba untuk mengeksplorasi kekayaan budaya Indonesia untuk menanamkan nilai demokrasi yang kuat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERAN GURU DALAM PENANAMAN NILAI DEMOKRASI SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII DI SMPN 8 KOTA CIREBON”**.

B. Identifikasi Masalah

Dalam identifikasi masalah ini penulis membagi dalam tiga tahapan yaitu:

Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam penulisan proposal penelitian ini adalah Sosiologi Pendidikan. Khususnya mengenai peran pembelajaran guru dalam menanamkan nilai demokrasi pada kehidupan siswa di sekolah maupun di masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Sehingga prosesnya diteliti secara detail tentang deskripsi “Peran guru dalam penanaman nilai demokrasi siswa pada pembelajaran IPS”.

c. Jenis Masalah

Seperti yang dibahas dalam uraian latar belakang masalah, bahwa jenis masalah dalam penelitian ini adalah berusaha mendeskripsikan Peran guru dalam menanamkan nilai demokrasi siswa pada pembelajaran IPS.

C. Pembatasan Masalah

Guna mengantisipasi kesimpangsiuran dalam permasalahan penulisan penelitian ini, maka diuraikan beberapa pembatasan masalah, sebagai berikut:

- a. Nilai demokrasi yaitu tidak suka memaksakan kehendak, tidak suka memotong pembicaraan orang lain, tidak egois, akomodatif terhadap kepentingan bersama, menonjolkan nalar dan akal sehat dan berpendapat, santun dan tertib dalam memberikan gagasan dan pendapat, peduli terhadap kemajuan masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Peran guru yang dimaksud adalah kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang dibekali dengan 4 (empat) kompetensi dasar yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan siswa. Serta dalam pembelajaran lebih bermakna bagi peserta didik sehingga mengorganisasi materi/bahan pelajaran disesuaikan dengan lingkungan, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Sehingga peserta didik dapat menguasai dimensi-dimensi pembelajaran IPS di sekolah, yaitu : “Menguasai pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan bertindak (*action*)”
- c. Guru yang menjadi objek penelitian adalah guru mata pelajaran IPS.
- d. Siswa yang menjadi objek penelitian adalah siswa kelas VIII.
- e. Pembiasaan merupakan komponen pendidikan yang digunakan untuk membentuk nilai demokrasi dengan berbagai strategi, metode, model. dan pendekatan.

D. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana upaya guru dalam menanamkan nilai demokrasi pada siswa kelas VIII?
- b. Bagaimana sikap demokrasi siswa pada pembelajaran IPS kelas VIII?

- c. Bagaimana fakta-fakta yang menjadi upaya penanaman nilai demokrasi pada siswa kelas VIII?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kejelasan terhadap upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai demokrasi pada siswa kelas VIII.
2. Mengetahui sikap demokrasi siswa pada pembelajaran IPS kelas VIII.
3. Mengetahui fakta-fakta yang menjadi upaya penanaman nilai demokrasi pada siswa kelas VIII.

F. Manfaat Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan tidak sia-sia, tentunya setiap penelitian harus memiliki kegunaan atau manfaat dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Peneliti

Untuk bekal dikemudian hari dalam profesinya sebagai guru yang mengajar IPS dan menambah wawasan keilmuan sebagai wujud dari partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmunya khususnya IPS.

2. Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman IPS siswa.

3. Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dari semua pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan khususnya bagi guru yang mengajar bidang studi IPS.

4. Lembaga Pendidikan

Bagi lembaga pendidikan diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan proses pembelajaran di lembaga pendidikan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan upaya guru dalam penanaman nilai demokrasi siswa yang dilaksanakan di SMPN 8 Kota Cirebon dilakukan melalui beberapa pendekatan, strategi, metode dan model, kegiatan pemberian keteladanan dan kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram.
2. Sikap demokrasi pada siswa dalam pelaksanaan pendidikan demokrasi pada mata pelajaran IPS melalui pembiasaan di SMPN 8 Kota Cirebon diantaranya kegiatan pemilihan ketua kelas, pembelajaran IPS dengan metode diskusi dan kesadaran diri peserta didik akan kebersamaan pada saat belajar.
3. Fakta-fakta penanaman nilai demokrasi melalui pembiasaan di SMPN 8 Kota Cirebon, Misalnya pada saat pembelajaran adanya: 1) sikap percaya diri dalam mengemukakan pendapat yang dibarengi dengan saling menghargai pendapat orang lain. 2) Toleransi seperti memahami keanekaragaman dalam kelas, menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, kebersamaan dan keseimbangan. 3) kebebasan yang bertanggung jawab seperti adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, terbuka dan komunikasi, tidak menggantungkan pada orang lain, dan mampu mengekang diri.

B. Saran-Saran

Dengan melihat hasil penelitian yang telah diketahui, maka peneliti memberikan saran pada pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk Kepala SMPN 8 Kota Cirebon sebaiknya harus memberikan pengawasan dan pengembangan secara menyeluruh terhadap profesionalisme guru dalam menanamkan pendidikan berbasis nilai-nilai demokrasi, serta dapat mencontoh dari kebaikan yang telah dilakukan oleh guru Mata Pelajaran IPS.
2. Untuk Guru Mata pelajaran IPS diharapkan selalu menjaga dan mengembangkan profesionalitas pembelajaran IPS yang berbasis demokrasi dan menyenangkan, sehingga peserta didik mampu menerima materi ajar dengan baik.
3. Bagi siswa diharapkan untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai macam dunia luar dan perubahan jaman yang begitu cepat dan diharapkan juga untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya tentang nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hasanah. 2012. *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abu ahmadi , Joko Tri Prasetya. 2005. Strategi belajar mengajar. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ahmad Fauzi. 2013. *Manajemen Pembelajaran*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ahmadi Abu. 2005. *Ilmu Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Andi Hakim Nasution. 1985. *Daun-daun Berserakan; Percikan Pemikiran Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*. Jakarta: Intisarana Aksara.
- Beni Ahmad Saebani, Khdiyat Hendra. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Betham, David. 2000. *Demokrasi*. Kansius: Yogyakarta.
- Bungin Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Chatib Munif. 2009. *Sekolahnya Manusia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- , 2013. *Sekolahnya Munusia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Chony, M. Junaidi & Almanshur, Fauzan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Dede Rosyada. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Dadang Supardan. 2009. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Enok Maryani. 2011. *Pengemabangan Program Pembelajaran IPS Untuk Peningkatan Keterampilan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Halimah, Deni, Koswara. 2008. *Bagaimana Menjadi Guru Kreatif?*. Bandung: PT. Pribumi Mekar.
- H. B. Hamdani Ali. 1993. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Kota Kembang.
- Ismail S.M., dan Abdul Mukti, (ed). 2002. *Pendidikan Demokratis dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Mudjiono. 1996. *Proses belajar mengajar*. Jakarta: PT. Remaja Rosada Karya.
- Jaja Suteja. 2013. *Etika Profesi Keguruan*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

- Juliansyah Tiana. 2008. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mahmud. 2006. *Psikologi Pendidikan Mutakhir*. Bandung: Sahifa.
- Majid Abdul. 2011. *Perencanaan Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhibbinsyah. 2010. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- M. Firdaus Zakarsi .2009. *Belajar cepat dengan diskusi*. Surabaya: Indah.
- Mulyasa E. 2011. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- _____. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasehuddien, Toto, Syatori. 2011. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cirebon: Nurjati Press.
- Oemar Hamalik. 2009. *Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CSBA*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Pipih Sopiah. 2010. *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Nobel Edumedia.
- Prasetya. 2000. *Filsafat Pendidikan: Untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prihatin Eka. 2008. *Guru Sebagai Fasilitator*. Bandung: PT. Karsa Mandiri Persada.
- Prihatin, Eka. (2011). *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Redi Panuju. 2011. *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pinus.
- Roqib, Nurfuadi. 2009. *Kepribadian Guru*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Roslin Elin. 2008. *Bagaimana Menjadi Guru Inspiratif?*. Bandung: PT. Karsa Mandiri Persada.
- Sapriya. 2009. *Pendidikan konsep dan pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sholehuddin. 2010. *Pendidikan Sebagai Basis Penguatan Kerukunan Masyarakat*. Depok: CV. Binamuda Ciptakreasi.

- Soejono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Somantri, Nu'man. 2011. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PPS-FPIPS UPI dan PT. Remadja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Susanto Hery. 2012. *Transformasi Masyarakat Cirebon*. Cirebon: Khalifah Mediatama.
- Suteja. 2009. *Pendidikan Berbasis Al-Quran*. Cirebon: CV. Pangger.
- Syaefaul Arifin. 2000. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Kekuasaan dan Pendidikan; Suatu tinjauan dari Perspektif Studi Kultur*. Magelang: Indonesia.
- Tonny D. Widiastono. 2004. *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- UNESCO. 1994. *Tolerance: The Threshold of Peace (Preliminary version)*. Paris: UNESCO.
- Winarno. 2011. *Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin S. 2005. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi, disampaikan pada Suscadorwas 2005*. Dikti: Jakarta
- Zakiah Derajat. 1995. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara dan Depag.
- Malkian Elvani (2010) dalam <http://yanel.wetpaint.com>
- Miftah Thoha. (1997). <http://perputakaan-online.com/hakikat-peran.html>
- www.nilai-nilaidemokrasi.com <http://yanel.wetpaint.com>